

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 6
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 1 September 2021
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:
1. RKA K/L Tahun 2022; dan
2. Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.
- Ketua Rapat : G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 46 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

5. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sekaligus Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
11. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, membahas RKA K/L Tahun 2022 dan Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp7.120.421.454.000,00** (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan S.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal

23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp700.000.000.000,00** (tujuh ratus miliar rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta seluruh Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada masing-masing unit kerjanya, dalam rangka memenuhi komitmen melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 agar lebih baik dari tahun 2020 sebesar 93,96%, sebagaimana kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Agustus 2021.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran Tahun 2021 menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai dampak Pandemi COVID-19, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hasil optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran Tahun 2021 dimaksud agar dapat disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2021.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan realokasi anggaran Tahun 2022 menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai dampak Pandemi COVID-19, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hasil realokasi anggaran Tahun 2022 dimaksud agar dapat disampaikan kepada Komisi IV DPR RI sebelum dilaksanakannya Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada awal bulan Oktober 2021.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk memperbaiki mekanisme penyusunan anggaran, agar keberhasilan pencapaian target realisasi kegiatan dan anggaran tidak semata hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi, namun yang lebih penting adalah manfaat atas kegiatan/program yang dilaksanakan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk melakukan upaya dalam meningkatkan pencapaian target penyelesaian Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam proses Tata Batas Kawasan Hutan.
8. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada bulan Oktober 2021, sebagai tindak lanjut Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 10 Juni serta 26 Agustus 2021, dengan topik sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Ekonomi Karbon di Indonesia;
 - b. Penanganan Permasalahan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - c. Penanganan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

G. Budisatrio Djiwandono
A-127

Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

Kepala Badan Restorasi
Gambut dan Mangrove,

Ttd.

Ir. Hartono, M.Sc.